

JAWI, ISSN:2622-5522 (p); 2622-5530 (e)

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawi>,

Volume 3, No. 1 (2020), p.1 -21, DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/jw.v3i1.7034>

Memahami Peta Integrasi dan Konflik di Indonesia

Maraimbang Daulay

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

daulaymaraimbang@yahoo.com

Abstract: *The emergence of various conflicts that have hit Indonesia recently whether based on race, ethnicity or religion is something that can disrupt national stability. In a sociological context, the presence of religion in addition to functioning as an integrative factor, can also be a factor in the emergence of conflicts, divisions and even in their forms, both within religious adherents and between religions. Religious issues sometimes become one of the triggers for conflict, religious beliefs often lead to intolerance and religious loyalty usually only unites some people and separates others. By using the literature analysis method, the conclusion is that the conflict that occurs is caused by self-concern between religious communities, fear of losing rights, fear and anxiety of decreasing believers in their religion. So, to minimize this, integration tips are needed. The efforts made include equitable fulfillment of the needs of all religious communities, then improving the quality of religious education in formal, non-formal schools and formulating religious harmony that guarantees freedom of experience, appreciation and understanding of Religion.*

Keywords: *Conflict, Integration, Religions*

Abstrak: *Munculnya berbagai konflik yang melanda Indonesia belakangan ini, baik yang dilandasi ras, suku atau pun agama merupakan sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Dalam kontek*

sosiologis, kehadiran agama selain berfungsi sebagai faktor integratif, dapat juga menjadi faktor penyebab munculnya konflik, perpecahan bahkan dalam bentuk bentuknya, baik di kalangan internal pemeluk agama, maupun antar agama. Isu-isu keagamaan terkadang menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik, keyakinan agama sering menimbulkan sikap tidak toleran dan loyalitas agama biasanya hanya menyatukan sebagian orang, dan memisahkan yang lainnya. Dengan menggunakan metode analisis kepustakaan dihasilkan kesimpulan bahwa konflik yang terjadi disebabkan oleh kekhawatiran diri antar umat beragama, khawatir kehilangan hak, ketakutan dan kecemasan berkurangnya umat beriman di agamanya. Sehingga untuk meminimalisir hal tersebut perlu adanya kiat-kiat integrasi. Upaya yang dilakukan diantaranya, pemerataan pemenuhan kebutuhan semua umat beragama kemudian meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah formal, non formal dan merumuskan kerukunan umat beragama yang menjamin kebebasan pengalaman, penghayatan dan pemahaman Agama.

Kata Kunci: *Konflik, Integrasi, Agama*

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia saat ini berada dalam dua arus besar yang saling tarik-menarik yang pada dasarnya berjalan paradoks, yaitu globalisasi dan semangat primordialisme. Pengaruh dan daya tarik globalisasi begitu kuat seakan tidak terbandung yang ditandai dengan hilangnya kedaulatan dan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa,¹ jati diri, dan lenyapnya wawasan kebangsaan

¹Sebagai contoh potensial menjadi penyebab dari keruntuhan ini antara lain adalah perubahan sosial dan budaya pada masyarakat yang begitu cepat. Meminjam pernyataan Antony Giddens, dalam hal ini Piötr Sztompka menyebutnya sebagai era kehidupan sosial yang mengagumkan, yang ditandai dengan transformasi yang sangat berbeda dengan era sebelumnya, seperti pembangunan sistem komunikasi global yang makin intensif, makin berjayanya kapitalisme ketika kesenjangan dunia semakin parah. Baca Piötr Sztompka, *The Sociology of Social Change*, Edisi bahasa Indonesia,

(nasionalisme). Sebaliknya, daya tarik primordialisme (baca: SARA) juga semakin menguat yang cenderung mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, yang ditandai dengan tuntutan pemekaran daerah yang bercirikan etnik dan budaya tertentu, keagamaan, otonomi kedaerahan yang diperluas, bahkan tuntutan pendirian negara baru yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Kedua arus ini tampaknya mempunyai kekuatan yang sama dan sama-sama mempengaruhi perkembangan bangsa. Keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa yang harmonis harus dipertahankan, yang dicapai lewat perjuangan kemerdekaan yang dibayar tinggi dengan pengorbanan pahlawan bangsa. Dalam hal ini agama-agama harus dan tetap menyampaikan fungsi kenabiannya dalam rangka koreksi, pembaharuan dan dalam rangka mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi dalam berbangsa dan bernegara.

Para pendiri bangsa (*founding father*) bangsa ini menyadari bahwa pada saat merumuskan dasar dan ideologi negara Indonesia, mereka dihadapkan pada realitas kemajemukan bangsanya. Mereka memandang bahwa kemajemukan tersebut bukanlah halangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, serta untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, damai, maju, dan sejahtera.

Sosiologi Perubahan Sosial, (Alimandan-alih bahasa), Jakarta: Prenada, 2007, h.v-vi.

²Memasuki era globalisasi, semua bangsa dihadapkan pada kondisi tantangan perubahan yang begitu cepat, sehingga dalam hal ini ketahanan suatu bangsa dan masyarakat diuji dalam memahami dan mensikapi roh zaman (*zeitgeist*) secara baik dan cermat. Kesalahan prediksi berdasarkan pemahaman dan pengkajian yang keliru akan mengakibatkan keruntuhan moral, etika dan kehidupan spiritual-keagamaan secara menyeluruh. Ketidakkampuan para pemimpin bangsa dan tokoh agama memahami arus perkembangan ini bukan tidak mungkin menyebabkan mereka akan kehilangan peran dan fungsi kenabiannya, semakin kerdil dan intovert, atau menjadi ikut-ikutan mengekor pada roh perkembangan zaman. Lihat, J. Garang, "Potensi, Peluang, dan Tantangan Kerukunan Beragama," dalam KH. Abdurrahman Wahid, dkk, *Agama dan Kekerasan: dari Teologi Anarkisme Politik ke Teologi Kekerasan*, 1999, A. Helmy Faishal (ed.), Jakarta: Elsas, h. 119-120.

Penelitian berkaitan dengan integrasi sosial sangat banyak dibahas oleh berbagai kalangan akademisi dalam berbagai macam bentuk tulisan, diantaranya adalah artikel “Integrasi Sosial Dalam Membangun Keharmonisan Masyarakat”³ tema ini mengangkat bentuk integrasi sosial di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sebagai Upaya dan sarana untuk membangun perdamaian di wilayah setempat ditemukan bahwa upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan perdamaian masyarakatnya dengan cara mendukung norma-norma dasar masyarakat, menjaga pemerataan juga keselarasan pendidikan dan ekonomi dan menjamin kestabilan perdamaian. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Saidin Ernas⁴, menjelaskan bagaimana kearifan lokal di Papua menjadi sarana untuk mewujudkan integrasi sosial masyarakat daerahnya.

Mengingat berbagai tantangan perubahan sosial dan kecenderungan perkembangan masyarakat baik dalam konteks global dan nasional, dan lokal tersebut, adalah cukup menarik mengkaji bagaimana peta integrasi dan konflik di Indonesia. Dengan menggubakan metode analitik kepustakaan dan menggunakan data data real yang ada, Tulisan ini berusaha untuk menelusuri potensi peta integrasi dan konflik yang dihadapi bangsa ini, serta rekomendasi alternatif pemecahannya.

B. Agama dan Integrasi Nasional

Pada prinsipnya ajaran setiap agama baik dan mengajak kepada kebaikan untuk mencapai keselamatan. Akan tetapi pada realitasnya tidak semua yang dianggap baik itu bisa bertemu dan seiring sejalan. Bahkan, dalam beberapa hal, bisa saja terjadi pertentangan antara yang satu dengan yang lain dengan berbagai argumentasi yang beragam. Misalnya, tidak mesti yang dianggap baik itu benar. Selain itu, apa yang benar menurut manusia belum tentu dibenarkan oleh Tuhan dan alasan lain yang dapat dimunculkan.

Menurut Joachim Wach, setidaknya terdapat dua pandangan

³ Afif Umikalsum, Fauzan “ *Integrasi sosial dalam membangun keharmonisan masyarakat*” Jawi, Vol.2 No. 1 2019. Hal. 65

⁴ Ernas, Saidin. “Dari Konflik ke Integrasi Sosial: Pelajaran Dari Ambon, Maluku.” *International Journal of Islamic Thought* Vol. 14, no. 2 (t.t.): 2018.

tentang kehadiran agama dalam suatu masyarakat, yaitu positif dan negatif. Pertama, adalah pandangan yang mengatakan bahwa agama berperan sebagai faktor integrasi. Ketika masyarakat hidup dalam suku-suku dengan sentimen sukuisme yang tinggi, bahkan di sana berlaku hukum rimba, biasanya agama mampu berperan memberikan ikatan baru yang lebih menyeluruh sehingga terkuburlah kepingan-kepingan sentimen lama sumber perpecahan tadi.

Agama dengan sistem kepercayaan yang baku, bentuk ritual yang sakral, serta organisasi keagamaan dalam hubungan sosial mempunyai daya ikat yang amat kuat bagi integrasi masyarakat. *Kedua*, adalah pandangan yang mengatakan sebaliknya, bahwa ketika agama hadir dalam satu komunitas, konflik dan perpecahan tak dapat dielakkan. Dalam kaitan ini, agama dinilai sebagai faktor disintegrasi yaitu menyebabkan terjadinya konflik masyarakat agama, disebabkan ketika agama hadir dengan seperangkat ritual dan sistem kepercayaannya, lalu kemudian melahirkan suatu komunitas tersendiri yang berbeda dari komunitas pemeluk agama tersebut. Rasa perbedaan tersebut akan semakin intens ketika para pemeluk suatu agama atau aliran keagamaan telah sampai pada sikap dan keyakinan penganut agama, bahwa satu-satunya agama yang benar adalah agama yang dipeluknya. Sedangkan yang lain salah dan kalau perlu dimusuhi.⁵

Pandangan yang dikemukakan oleh Joachim Wach ini, bagi bangsa Indonesia amat mudah dipahami. Sebelum Islam datang, bentuk persatuan memang sudah ada dan terjalin kuat di bumi nusantara ini. Apa yang mengikat mereka? Boleh jadi oleh emosionalitas keyakinan pada agama Hindu atau Buddha, atau bisa saja karena rasa sukuisme. Sebagian sosiolog mensejajarkan ikatan agama dengan ikatan kesukuan, bahkan juga nasionalisme, misalnya Emile Durkheim. Akan tetapi persoalan itu masih perlu dipertanyakan, sejauh mana dan seberapa kuat rasa persatuan tadi terwujud? Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat pada Hayam Wuruk dan Gajah Mada dari Majapahit dalam merintis persatuan nusantara, bagaimana pun juga kehadiran Islam di nusantara mempunyai andil yang amat besar bagi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai

⁵ Joachim Wach, 1971. *Sociology of Religion*, University of Chicago Press, Chicago and London, h. 35.

Merauke.

Dalam kaitan ini, ada thesis yang cukup menarik dari Muhammad Naquib al-Attas yang mengemukakan bahwa bahasa Melayu berkembang cepat di nusantara karena Islam, yang pada akhirnya diresmikan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu yang relatif digunakan oleh kelompok kecil sanggup mengeser bahasa Jawa yang dominan? Naquib al-Attas menyatakan bahasa Jawa telah dirasuki falsafah Hindu yang *feodalistik* dan membagi manusia pada kelas-kelas, sementara Islam yang bersifat demokratis, tidak mengenal kelas. Satu-satunya alternatif yang tepat adalah berkomunikasi dengan bahasa Melayu. Jalinan antara sifat Islam yang demokratis dengan bahasa Melayu yang digunakan, lalu disebarkan oleh para pedagang yang merangkap sebagai juru dakwah, maka pada waktu yang relatif singkat tersebarlah bahasa Melayu ke seantero nusantara ini. Islam memperkuat penyebaran bahasa, bahasa mendorong serta memperkuat timbulnya persatuan nusantara, dan pada gilirannya lahirlah kesatuan nasional dengan Islam sebagai dasarnya, ditambah bahasa Melayu dan nasionalisme sebagai pilarnya.⁶ Dengan demikian, mengikuti teori Joachim Wach, bagaimana pun juga kehadiran dan eksistensi Islam di Indonesia ini jelas merupakan faktor integrasi sekaligus konflik yang amat besar bagi eksistensi dan politik Indonesia di masa mendatang.

Donald Eugene Smith menyebutkan dominasi agama dalam pecaturan politik, khususnya di dunia ketiga termasuk Indonesia, semakin merosot sejak abad ke-19 M. Sedangkan sebelumnya, hampir di semua negara dunia ke tiga, pemegang legitimasi kekuasaan negara adalah kaum agama, baik mereka beragama Hindu, Buddha, Kristen, maupun Islam. Namun sejak masuknya pengaruh Barat, baik melalui jalur kolonialisme maupun literatur, agama yang tadinya dominan mulai tergeser oleh paham nasionalisme, dengan perangkat demokrasi, liberalisme, otoritarianisme, dan lain-lainnya.⁷

⁶Saiful Muzani, *Pandangan Dunia dan Gagasan Islamisasi Ilmu Syed Muhammad Naquib Al-Attas*, dalam *Jurnal Hikmah*, No. 3 Juli-Oktober 1991.

⁷ Donald Eugene Smith (ed.), 1974. *Religion, Politics, and Social Change in the Third World*, New York: Free Press. Lihat juga bukunya, 1974. *Religion and Political Modernization*, New Haven dan London: Yale University Press. Menurut Smith, perpecahan antara gereja di Barat pada

Dalam perkembangannya, babakan sejarah politik Indonesia mempe-rlihatkan adanya pergeseran peran tokoh agama dalam relasi kuasa, yang cenderung fluktuatif, karena agama dan politik masing-masing mempunyai tujuan dan cara-cara tersendiri yang disebut anti kezaliman. Dari kerangka teori tertentu, apa yang dipaparkan tersebut memang benar. Agama semakin jauh dari pecaturan politik atau dijauhkan, sementara ia sekali waktu dimanfaatkan untuk kepentingan politik adalah kenyataan. Berkaitan dengan ini Sartono Kartodirdjo, menyatakan bahwa ketika dalam masyarakat timbul keresahan akibat mereka tidak puas terhadap penguasa resmi, agama tampil dalam pihak oposisi. Pemerintah resmi waktu itu (maksudnya Belanda) berbuat sewenang-wenang menindas rakyat, misalnya kebijaksanaan menaikkan pajak pendapatan serta merampas hak-hak rakyat, rasa antipati rakyat kepada penguasa semakin membengkak. Secara hitam putih, penguasa dikatakan tidak adil, lalim, menindas, mengeruk harta rakyat, dan semacamnya, namun rakyat tidak mempunyai keberanian melakukan protes secara baik-baik. Antipati mereka juga memberikan sikap pesimis bahwa protesnya akan mendapat perhatian yang diharapkan.⁸

masa Renaissance agaknya akan dipasarkan di dunia ketiga, dengan kondisi sosio-kultural yang berbeda. Kalau di Barat mundurnya agama (gereja) menyebabkan liberalisme langsung dapat diterapkan sebagai faktor pemersatu, akan tetapi di dunia ketiga tidak demikian. Pergolakan-pergolakan politik di beberapa negara, misalnya di Chilli, Vietnam Utara, dan Indonesia, terlihat bahwa betapa besar peran agama dalam pengambilan keputusan politik. Para tokoh agama memiliki peran yang besar dalam melahirkan nasionalisme Indonesia, di mana antara pejuang-pejuang kemerdekaan yang menamakan dirinya kaum nasionalis dan kaum agama, sulit untuk dipisahkan.

⁸ Adanya jurang pemisah di muka, satu-satunya tempat mengadu rakyat yang merasa tertindas tadi ialah pemimpin-pemimpin informal, yakni para kiyai dan ustadz. Mereka bisa bertemu dalam satu titik, bahwa di mata rakyat penguasa adalah lalim dan menindas, sedangkan di mata para kiyai, penindasan dan kezaliman adalah tindakan melawan melawan agama dan Tuhan, jadi harus dimusuhi. Jalinan tersebut melahirkan satu kekuatan, rakyat sebagai kekuatan massal, sedangkan tokoh agama memberikan “virus” semangat jihad (*spirit of martyrdom*). Emosionalitas massa yang ter-tekan dan dilegitimasi oleh semangat berjuang demi keadilan ini berkobar sehingga terjadi pemberontakan di sana-sini melawan Belanda. Oleh karenanya, sejarah mencatat hampir tidak ada satu pemberontakan pun yang tidak disemangati ajaran agama dan dipimpin oleh kiyai atau tokoh agama.

C. Agama dan Konflik Nasional

Konflik nasional yang terjadi di Indonesia, bila ditelusuri secara mendalam secara jujur harus diakui berawal ketika pada pendiri bangsa ini hendak merumuskan seperti apa bentuk negara-bangsa Indonesia itu. Perdebatan berkisar tentang dasar negara yang melibatkan kelompok ‘nasionalis sekuler’, kelompok ‘nasionalis Islam,’ dan ‘nasionalis sosialis’⁹ dalam sidang-sidang KNIP berlangsung alot, dan berakhir dengan kesepakatan menyetujui Pancasila sebagai dasar negara, pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam hal ini, kelompok ‘nasionalis Islam’ gagal memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.

Akan tetapi konflik mengenai dasar negara ini belum berakhir sampai sekarang, yang ditandai dengan upaya mengamandemen UUD 1945. Selain itu, persoalan yang sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya konflik adalah berkenaan dengan gagasan implementasi nilai Islam dan kebebasan beragama dalam kehidupan berbangsa. Pembicaraan tentang hal ini telah melahirkan kelompok penggiat HAM yang sering memberikan penilaian kritis terhadap kerukunan hidup umat beragama di Indonesia yang kemudian diimbangi oleh kelompok Front Pembela Islam, Forum Umat Islam. Persoalan yang menjadi titik utamanya adalah pandangan dalam menempatkan posisi berbagai paham keagamaan yang muncul belakangan, semisal Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang dinilai telah menista dan melecehkan ajaran Islam.

Persoalan lainnya adalah bahwa sejumlah kerusuhan dan konflik sosial telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan semakin meningkat dalam satu dasawarsa terakhir. Beberapa di antaranya berskala besar dan berlangsung lama, seperti kerusuhan di Aceh (mulai 1990-an), gerakan reformasi (Mei 1998), Ambon, (1998), Poso (1998), Dili, Timor Timur (referendum 1999),

Lihat, Sartono Kartodirdjo, 1978. *Protest Movement in Rural Java*, Singapore: Oxford University Press, h. 17.

⁹Tentang pengkategorian ini, lihat Yusril Ihza Mahendra, “Makna dan Peranan Islam dalam Proses Sosio-Politik di Indonesia,” dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk (Editor), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr .H. Munawir Sjadzali, MA*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995, h. 369.

Ketapang, Madura (1999), Maluku Utara (2000), dan Timika, Papua yang mencuat belakangan ini dan beberapa tempat lain.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, disebutkan bahwa konflik yang terjadi di berbagai daerah Indonesia itu pada awalnya disebabkan adanya kesenjangan ekonomi dan kepentingan politik. Eskalasi politik meningkat cepat karena mereka yang bertikai melibatkan sentimen keagamaan untuk memperoleh dukungan yang cepat dan luas. Agama dalam kaitan ini bukan pemicu konflik, karena isu agama itu muncul belakangan.

Abdurrahman Wahid mengemukakan bahwa konflik antar umat ber-agama dapat disebabkan oleh faktor keagamaan dan non-keagamaan.¹⁰

1. Faktor Doktrin Keagamaan

Agama pada dasarnya memiliki faktor integrasi dan disintegrasi. Faktor integrasi antara lain, bahwa agama mengajarkan persaudaraan atas dasar iman, kebangsaan dan kemanusiaan. Agama mengajarkan kedamaian dan kerukunan di antara manusia dan sesama makhluk. Agama mengajarkan budi pekerti yang luhur, hidup tertib dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ajaran yang disebutkan itu bersifat universal. Selain itu, terdapat ajaran agama yang juga bisa menimbulkan disintegrasi, bila dipahami secara sempit dan kaku. Di antaranya, setiap pemeluk agama menyakini bahwa agama yang dianutnya adalah jalan hidup yang paling benar, sehingga dapat menimbulkan prasangka negatif atau sikap memandang rendah pemeluk agama lain.¹¹

Secara internal, teks-teks keagamaan dalam satu agama juga terbuka terhadap aneka penafsiran yang dapat menimbulkan aliran dan kelompok keagamaan yang beragam, bahkan bertentangan satu sama lain sehingga memicu konflik.¹² Di sisi lain, dalam tataran historisnya misi agama tidak selalu artikulatif. Selain

¹⁰Lihat Abdurrahman Wahid, 1984. “*Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa*,” dalam *Majalah Prisma*, Edisi extra, h. 3-9.

¹¹ Abdurrahman Wahid, “Pribumisasi Islam,” dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (ed.), 1989. *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3M), h. 81-96.

¹²Abdurrahman Wahid, “*Massa Islam dalam...*,” h. 8.

sebagai pemersatu sosial, agama pun menjadi unsur konflik, di mana “agama acapkali menampakkan diri sebagai sesuatu yang berwajah ganda”¹³ Adapun faktor-faktor agama sebagai pemicu konflik, antara lain adalah:

a. *Adanya Klaim Kebenaran (Truth Claim)*

Setiap agama punya kebenaran. Keyakinan tentang yang benar itu didasarkan pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Pluralitas manusia menyebabkan wajah kebenaran itu tampil beda ketika akan dimaknakan. Sebab perbedaan ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari berbagai referensi dan latar belakang orang yang meyakinkannya. Mereka mengklaim telah memahami, memiliki, bahkan menjalankan secara murni dan konsekuen nilai- nilai suci itu. Keyakinan tersebut akan berubah menjadi suatu pemaksaan konsep-konsep gerakannya kepada manusia lain yang berbeda keyakinan dan pemahamannya.

Dalam doktrin agama, terdapat seruan untuk menuju keselamatan yang dibarengi dengan kewajiban mengajak orang lain menuju keselamatan tersebut. Jika kepentingan ini lebih diutamakan, masing-masing agama akan berhadapan dalam menegakkan hak kebenarannya. Ini akan memunculkan sentimen agama, sehingga benturan pun sulit dihindari. Fenomena yang seperti inilah yang dapat melahirkan konflik antar agama. Misalnya, peristiwa Perang Salib antara umat Islam dan umat Kristen. Tragedi ini sangat kuat muatan agamanya, dari pada politisnya.

b. *Kekaburan persepsi antar wilayah agama dan suku/etnis*

¹³ Sandra Kartika dan M. Mahendra (Ed.) 1999. *Dari Keceragaman Menuju Keberagaman; Kata Pengantar*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, h. vi. Hal ini senada dengan pendapat Johan Efendi yang menyatakan “Bahwa agama pada suatu waktu memproklamkan perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan, dan persaudaraan. Namun, pada waktu yang lain menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang dianggap garang dan menyebar konflik. Bahkan tidak jarang dicatat dalam sejarah menimbulkan peperangan.

Mayoritas rakyat Indonesia lebih mensejajarkan persoalan agama dengan suku dan ras. Pemahaman yang kabur ini bisa menimbulkan ke-rawanan atau kepekaan yang sangat tinggi, sehingga muncul benih-benih sektarianisme. Seperti dalam kasus AM Saefuddin, yakni Menteri Negara Pangan dan Holtikultura pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie. dalam pernyataannya “Megawati Pindah Agama menjadi Agama Hindu, karena dia telah menyaksikan seseorang yang beragama Islam (Megawati) ikut melakukan kegiatan ritual agama Hindu di Bali. Akibatnya, setelah pernyataan itu dilontarkan terjadi sejumlah demonstrasi, bahkan berubah menjadi kerusuhan.

c. Doktrin Jihad dan kurangnya sikap toleran dalam Kehidupan Beragama

Seorang agamawan sering kali mencela sikap sempit dan tidak toleran pada orang lain yang ingin menganiayanya, pada hal disisi lain mereka sendiri mempertahankan hak dengan cara memaksa dan menyerang orang yang mereka anggap menyimpang. Bahkan, mereka menganggap membu-nuh orang yang menyimpang itu sebagai kewajiban (jihad fi sabilillah).¹⁴

d. Minimnya pemahaman terhadap ideologi pluralisme

Islam mengakui bahwa masyarakat terdiri atas berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima keragaman budaya dan agama dengan memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya.¹⁵ Oleh karena itu, kecurigaan

¹⁴ Beberapa peristiwa penyerangan terhadap sejumlah kepentingan asing dan tempat hiburan yang dianggap sebagai sumber dan sarang maksiat, di berbagai daerah di Indonesia misalnya banyak melibatkan anggota Jemaah Islamiyyah dan Front Pembela Islam (FPI). Dengan sendirinya, apa yang mereka lakukan itu merupakan sebuah perjuangan untuk melawan dan menghancurkan kepalsuan. Bahkan kita akan meyakini adanya unsur kesucian dalam perang itu, sehingga mati di dalamnya di anggap kehormatan yang besar sebagai syahid/martir.

¹⁵ Q.S. al-Baqarah/2: 148.

tentang sifat Islam yang anti plural dan suka kekerasan itu sangatlah tidak beralasan.

Pluralisme telah diteladankan oleh Nabi Muhammad saw., ketika beliau berada di Madinah, telah memberikan teladan tentang pluralisme, di mana masyarakat non-Muslim tidak pernah dipaksa untuk mengikuti agamanya. Bahkan dalam perjanjian dengan penduduk Madinah ditetapkan dasar-dasar toleransi demi terwujudnya perdamaian dan kerukunan.

e. *Islamophobia politik*

Adanya ketakutan terhadap Islam politik sebenarnya seringkali muncul dalam masyarakat. Pada masa awal Orde Baru, saat itu pemerintahan Soeharto memberikan kepercayaan dan kekuasaan penuh kepada CSIS sebagai *think thank* pemerintah terutama dalam bidang ekonomi dan politik, yang terdiri dari kalangan Kristen (Katholik) mendapat tempat yang lebih terhormat dibanding Islam sebagai mayoritas. Dominasi mereka tampak dalam kebijakan-kebijakan politik ekonomi yang jelas-jelas memihak Cina dan menindas ekonomi kerakyatan yang berbasis pribumi muslim yang pada era sebelumnya sempat berjaya. Konon, dalam sebuah rapat kabinet, Ali Said, Menteri Kehakiman saat itu yang mengawali sambutannya dengan salam, langsung ditegur keras oleh Menko Polkam L.B. Moerdani, "Ini bukan negara Islam", katanya. Sehingga pada saat itu muncullah pernyataan Abdurrahman Wahid yang pernah mengusulkan penggantian ucapan '*Assalamu'alaikum*' dengan ucapan '*Selamat pagi*'.¹⁶

¹⁶Sebenarnya Islamo-phobia mulai menggejala ketika Soeharto menolak rehabilitasi Masyumi -parpol Islam yang dinilai sangat fundamentalis- yang dibubarkan Soekarno pada tahun 1960, disusul dengan dikeluarkannya "daftar hitam" sekitar 2500 tokoh Masyumi. Mereka tidak boleh dicalonkan oleh Parmusi, Partai Islam satu-satunya di awal Orba (1968). Menurut Hartono Mardjono, langkah tersebut diambil untuk membatasi perkembangan Parmusi yang berasaskan Islam. Jauh sebelum peristiwa itu, golongan Islam yang didefinisikan sebagai orang yang beragama Islam, memiliki orientasi politik dan pemikiran Islam, setelah meraih ± 45 % suara dalam pemilu 1955, berusaha menuntut perubahan dasar negara dan UUD 1945. Namun perjuangan mereka untuk menjadikan

Selain faktor yang terkait dengan doktrin, ada beberapa faktor keagamaan lain yang secara tidak langsung dapat menimbulkan konflik di antara umat beragama. Di antaranya: 1) Penyiaran agama, 2) Bantuan keagamaan dari luar negeri, 3) Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, 4) Pengangkatan anak, 5) Pendidikan agama, 6) Perayaan hari besar keagamaan, 7) Perawatan dan pemakaman jenazah, 8) Penodaan agama, 9) Kegiatan kelompok sempalan 10) Transparansi informasi keagamaan dan 11) Pendirian rumah ibadat.¹⁷

Bagi sejumlah agama tertentu, penyiaran agama merupakan perintah agama. Kegiatan ini sering dilakukan tanpa disertai dengan kedewasaan dan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain, untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Akibatnya terjadi kasus-kasus pembujukan yang berlebihan dan pemaksaan terselubung, maupun terang-terangan. Kasus semacam itu, seringkali telah merusak hubungan antar umat beragama. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan SKB Menag dan Mendagri Nomor: 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Ke-agamaan di Indonesia.

Faktor lain terkait dengan perkawinan. Dalam kemajemukan masyarakat di Indonesia, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda sering menjadi pemicu terganggunya hubungan antar umat beragama. Hal itu terlihat jika perkawinan dijadikan salah satu alat untuk mengajak pasangan agar berpindah agama. Konversi agama dilakukan untuk mengesahkan perkawinan. Setelah perkawinan berlangsung beberapa lama, orang yang

Islam sebagai dasar negara, gagal setelah Soekarno mencanangkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali kepada Pancasila dan UUD '45. Proses marginalisasi umat Islam kembali meruyak selain dua dasawarsa berikutnya (1969-1989), melalui proses "depolitisasi Islam" dan "deislamisasi politik". Apalagi sejak dikeluarkannya UU No. 3/1985 yang menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas Papol, maka tertutuplah peluang untuk menjadikan Islam sebagai asas Papol, apalagi untuk dipejuangkan sebagai dasar negara. Dominasi pemerintah orba dalam mengekang kehidupan politik warganegara merupakan upaya untuk meredam konflik, demikian menurut Masykuri Abdullah.¹⁶

¹⁷ Abdurrahman Wahid, "Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama," *Aula*, Mei 1985, h. 31.

bersangkutan kembali ke agamanya semula dan mengajak pasangannya untuk memeluk agama tersebut.¹⁸

Kasus yang juga sering muncul adalah terkait dengan pendirian rumah ibadah. Kehadiran sebuah rumah ibadah sering mengganggu hubungan antar umat beragama, atau bahkan memicu konflik karena lokasinya berada di tengah komunitas yang kebanyakan menganut agama lain. Rumah ibadah dalam kaitan ini, tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah atau kegiatan keagamaan semata, tetapi juga sebagai simbol keberadaan suatu kelompok agama.¹⁹

Permasalahannya menjadi rumit jika jumlah rumah ibadah tersebut dipandang oleh pihak lain tidak berdasarkan keperluan, melainkan untuk kepentingan penyiaran agama pada komunitas lain. Kasus-kasus yang terkait dengan pengrusakan rumah ibadah menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya SKB Menag dan Mendagri Nomor: 1 Tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 9 Tahun 2006/Nomor: 8 Tahun 2006, tanggal 21 Maret 2006.

Kasus yang lain adalah adanya konflik intern umat beragama, seperti penetapan awal Hari-hari Besar Agama Islam, misalnya 1 Ramadan, 1 Syawal, dan sebagainya. Dalam hal ini M. Ridwan Lubis mengemukakan bahwa betapa masyarakat diliputi kegelisahan ketika menjelang akhir Ramadhan kemarin (2011-pen). Melihat kegelisahan yang terjadi pada akhir Ramadhan kemarin dan seterusnya berlanjut dengan perbedaan awal Syawal tentulah sudah waktunya pemerintah mengambilalih persoalan itu.

¹⁸ Untuk uraian lebih lanjut tentang pribumisasi Islam, lihat Abdurrahman Wahid, “*Salahkah Jika Dipribumikan?*” *Tempo*, 16 Juli 1991, h. 19, dan “*Pribumisasi Islam*. Muntaha Azhari dan Abdul Mun’im Saleh (ed.), 1989. *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Lihat pula, “*Merelevansikan Bukannya Menghilangkan Salam*,” *Amanah*, No. 22, Mei 8-21, 1987.

¹⁹ Sebagai contoh, adanya sikap pemaksaan kehendak pihak Kristen unruk mendirikan gereja di Perumahan Jasmine, Bogor telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat sekitar. Bahkan pemerintah setempat telah bersedia merelokasi rencana pendirian rumah ibadah tersebut, tetapi para tokoh Kristen dan jemaahnya menolak tawaran pemerintah tersebut, sehingga penyelesaiannya belum tuntas dan sangat dilematis (penulis).

Sehingga masyarakat sejak awal telah diarahkan menuju kepada kesepakatan terhadap penentuan awal bulan. Solusinya menurut beliau, untuk memberikan kepastian terhadap pelak-sanaan syariat yang menyangkut kepentingan umat Islam tampaknya pemerintah perlu diberi kewibawaan baru yang diatur dalam undang-undang perlindungan kehidupan beragama dan itu adalah merupakan bagian dari perumusan format ideal kehidupan beragama di Indonesia. Sehingga setiap orang terikat dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah terutama dalam hal penetapan hari besar keagamaan.²⁰

2. Faktor-faktor non Keagamaan

Adapun faktor-faktor non-keagamaan yang diidentifikasi sebagai penyebab ketidakrukunan umat beragama meliputi beberapa hal, antara lain 1) kesenjangan ekonomi, 2) kepentingan politik, 3) perbedaan nilai sosial budaya, 4) kemajuan teknologi informasi dan transportasi.²¹

Thomas F. O’dea mengatakan bahwa konflik yaitu

²⁰ *Waspada Online*, Monday, 05 September 2011. Menurut pendapat M. Ridwan Lubis, membiarkan umat selalu dibayang-bayangi oleh perbedaan dalam penetapan awal bulan adalah suatu langkah yang kurang bijak karena akan berdampak terhadap berbagai implikasi sebagai berikut. *Pertama*, terbangun kesan bahwa ajaran Islam membuka terjadinya perbedaan yang mengarah kepada perselisihan di kalangan umat Islam. Dalih yang mengatakan bahwa perbedaan umatku adalah rahmat yang selama ini didasarkan kepada Hadis Rasul tentunya harus dipahami secara proporsional. *Kedua*, terbangun kesan bahwa amat sulit mempersatukan umat Islam dalam berbagai hal termasuk bidang politik keIslaman sekalipun terdapat banyak titik persamaan di dalam ajaran Islam akan tetapi fenomena “konflik” hampir selalu terjadi pada setiap penentuan awal bulan. Bagaimana diharapkan umat Islam dapat menyelesaikan agenda-agenda besar keummatan sementara urusan penentuan awal bulan saja selalu menjadi polemik pada setiap tahun. Hal ini tentu saja membentuk opini betapa rapuhnya kondisi internal umat Islam karena persoalan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun tidak pernah bisa dilakukan penyelesaian secara tuntas.

²¹ Lihat, misalnya, beberapa tulisan Adi Sasono, "*Peta Permasalahan Sosial Umat Islam dan Pokok-Pokok Pemikiran Usaha Pengembangannya: Beberapa Catatan*," makalah tidak diterbitkan, Mei, 1984; "*Moral Agama dan Masalah Kemiskinan*," makalah tidak diterbitkan, 21 April 1985; "*Usaha Pengembangan Emansipasi Sosial: Beberapa Catatan*," A Rifa'i Hasan dan Amrullah Achmad (ed.), *Perspektif Islam dalam Pembangunan Bangsa*, Yogyakarta: PLP2M, 1986, h. 323-335.

percekcokan, perselisihan-perselisihan, dan pertentangan. Jika kata ini digabung dengan term sosial menjadi suatu pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Menurut teori konflik, masyarakat adalah suatu keadaan konflik yang berkesinambungan di antara kelompok dan kelas serta berkecenderungan kearah perselisihan, ketegangan, dan perubahan. Jadi masyarakat merupakan lahan yang subur bagi tumbuhnya konflik. Bibitnya bisa bermacam-macam faktor: ekonomi, politik, sosial, bahkan agama.²²

Kehadiran pendatang di satu daerah sering menimbulkan kesenjangan ekonomi, sebab mereka lebih ulet dan trampil bekerja dibandingkan dengan penduduk asli. Kondisi itu sering menimbulkan kecemburuan sosial dan dapat memicu konflik. Selanjutnya, dalam berbagai kasus, munculnya suatu kelompok politik juga dipengaruhi oleh misi keagamaan dari para elit kelompok politik tersebut. Ketegangan di antara elit politik tersebut pada gilirannya dilihat sebagai pertikaian antar kelompok politik yang berbeda agama. Selain itu, perbedaan nilai budaya juga dapat menjadi penyebab konflik bila suatu komunitas yang kebetulan menganut agama tertentu mengalami ketersinggungan karena perilaku atau tindakan pihak lain, yang kebetulan menganut agama, atau paham yang berbeda kurang memahami atau kurang menghargai adat istiadat, atau budaya yang mereka hormati.²³

D. Alternatif Pemecahan Masalah

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika, yang dibentuk oleh sejarah bangsa Indonesia itu sendiri sedemikian rupa. Oleh karena itu harus diterima dan bergumul bersama untuk membangunnya, yaitu membangun masyarakat Pancasila. Adapun yang dapat dilakukan bersama dan bagaimana upaya dan cita-cita itu diwujudkan, antara lain adalah; *Pertama*, mengembangkan sikap etis, sehingga tercermin tercermin pertemuan antara iman (vertikal) dengan masalah-masalah sosial kemasyaraktan yang nyata (horizontal) sebagai ungkapan tanggungjawab kebersamaan yang konkrit.

²² *Ibid.*

²³ Lihat, M. Dawam Rahardjo, "Umat Islam dan Pembaharuan Teologi," dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal (ed.), 1983. *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Leppenas, h. 117-132.

Iman dan amal haruslah sejalan, seperti halnya kata dengan perbuatan. *Kedua*, sikap mulia ini tidak saja dilakukan sendiri-sendiri atau sepihak, tetapi bersama-sama dalam rangka membangun masyarakat warga (civil society) yang bertanggungjawab sebagai umat sekaligus warga negara, kepada Tuhan dan sesama.

Ketiga, suatu pemerintahan boleh berganti namun tugas dan tanggungjawab umat beragama tidak boleh dan tidak pernah berubah. Hal ini hendak membuktikan kenyataan sejarah bahwa tidak ada suatu sistem, baik ekonomi politik, budaya atau ideologi yang menjamin tegaknya keadilan dan kebenaran, kerukunan dan perdamaian secara berkesinambungan.

Keempat, masyarakat majemuk memang mengundang berbagai masalah, seperti halnya demokrasi itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia yang serba majemuk ini memerlukan kearifan bagaimana mengembangkan ke-bhinneka-an tanpa mengurangi hakekat ketunggal-ikaan. Sebaliknya, dalam konteks agama-agama adalah bagaimana demi kerukunan, kebebasan beragama tidak harus dikorbankan, demikian juga sebaliknya.

Kelima, Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara sekuler atau negara agama. Jadi tidak perlu mengagamakan Pancasila, dan mem-Pancasila-kan agama. Akan tetapi untuk memudahkan penganut agama melaksanakan ajaran agamanya, maka peran pemerintah dalam ini Kementerian Agama dipandang penting, sebagaimana di kemukakan M. Ridwan Lubis:

“...apabila ditelaah, maka persoalan penting yang sekarang menjadi agenda Kementerian Agama dapat dikemukakan sebagai berikut. *Pertama*, Rencana Pembangunan Pemerintah di bidang keagamaan terfokus pada peningkatan pemahaman, penghayatan, pelayanan, dan pengamalan ajaran agama. Pemahaman tentang ajaran agama yang dianut oleh warga negara memerlukan peningkatan agar seluruh warga menganut berbagai agama dalam rangka perwujudan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pemahaman agama yang meningkat, baik agama yang dianutnya maupun juga terhadap agama yang lain, diharapkan agar wawasan keberagaman tidak lagi sebagai sekadar simbol jati diri, akan tetapi menjadi landasan nilai yang menjadi acuan sebagai pilihan etik, moral, dan spiritual agar hidup rukun, damai, serta jauh dari konflik social. Gerakan radikalisme agama menunjukkan betapa

masyarakat telah terkontaminasi dengan pola penyempitan pemahaman terhadap ajaran agama, seperti kata jihad, dakwah, sabilillah, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah beserta sahabat serta ulama salaf adalah mereka yang mengajarkan kedamaian dan toleransi terhadap perbedaan.

Kedua, gerakan menuju kerukunan adalah suatu agenda pembangunan bangsa yang tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat komitmen masyarakat terhadap kerukunan menjadi syarat mutlak terhadap kelangsungan pembangunan. Selama ini, betapa energi pemerintah dan pemuka agama banyak tersita oleh persoalan konflik di antara umat beragama sehingga menyebabkan beberapa agenda lain dari pembangunan menjadi terpengaruh. Selama ini, pemahaman masyarakat terhadap kerukunan belum tuntas.²⁴

Berkaitan dengan pengangkatan Wakil Menteri Agama dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, menurut M. Ridwan Lubis ada tiga agenda besar yang diharapkan dapat dilakukan percepatan sebagai alasan dibentuk jabatan wakil menteri agama. Ketiga agenda itu adalah peningkatan serta pendekatan yang komprehensif terhadap kepentingan semua umat beragama, baik untuk kelompok dominan maupun yang kecil sehingga semua umat beragama, baik mondial, agama timur, maupun agama lokal merasa memiliki jarak yang sama terhadap negara. Tugas pemfasilitasan itu tentulah melihat kepentingan dan kebutuhannya. Kepentingan pelayanan terhadap kelompok dominan tentulah lebih besar dan luas cakupannya dibanding dengan kelompok yang kecil. Dalam kaitan itu, terminologi mayoritas-minoritas tidak lagi dipahami masyarakat sebagai adanya superioritas atau inferioritas oleh sebagian masyarakat. Akan tetapi, merupakan suatu keniscayaan sebagai perwujudan tanggung jawab yuridis negara berdasarkan konstitusi.

Agenda kedua adalah peningkatan kualitas pendidikan agama, baik muatan, desain pola relasi antar umat, maupun integrasinya terhadap program pembangunan nasional sehingga terwujud format ideal kehidupan beragama di Indonesia. Dan, agenda ketiga adalah merumuskan format kerukunan hidup umat beragama yang menjamin terwujudnya kebebasan umat beragama dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran

²⁴*Harian Republika*, 20 Oktober 2011

agamanya, namun pada sisi lain kebebasan itu tidak bersinggungan dengan kebebasan yang juga dimiliki saudaranya yang lain.²⁵

E. Kesimpulan

Hubungan antar umat beragama di Indonesia sejauh ini tidak bisa lepas dari problem mayoritas dan minoritas. Di kalangan mayoritas sering timbul perasaan tidak puas karena terdesak dalam posisi dan perannya. Sedang di kalangan minoritas sering timbul ketakutan karena merasa terancam eksistensi dan hak-hak asasinya. Potensi ketidakharmonisan dalam konteks mayoritas-minoritas di atas jika tidak bisa dieliminir akan membawa implikasi dalam hubungan antar umat beragama, pergaulan masyarakat dan dapat menggejala dalam berbagai bentuk ketegangan.

Munculnya berbagai konflik yang melanda Indonesia belakangan ini, baik yang dilandasi ras, suku atau pun agama merupakan sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Dalam konteks sosiologis, kehadiran agama selain berfungsi sebagai faktor integratif, dapat juga menjadi faktor penyebab munculnya konflik, perpecahan bahkan dalam bentuk peperangan, baik di kalangan internal pemeluk agama, maupun antar agama. Isu-isu keagamaan terkadang menjadi salah satu pemicu perang, keyakinan agama sering menimbulkan sikap tidak toleran dan loyalitas agama biasanya hanya menyatukan beberapa orang tertentu dan memisahkan yang lainnya.

Konflik antar umat beragama terjadi kebanyakan karena adanya kekhawatiran dari antar umat beragama kehilangan hak dan kebebasan mendirikan rumah ibadah dan menjalankan ibadahnya, seperti yang dialami umat Kristen di Perumahan Jasmine Bogor. Sedangkan umat Islam cemas akan kekurangan atau kehilangan umatnya akibat gencarnya gerakan misi Kristen berkedok gerakan kemanusiaan. Selain itu, konflik antara Islam dan Kristen jika ditelusuri dari sejarah hubungan keduanya yang banyak diwarnai peperangan, seperti Perang Salib, serta karena cara atau sikap dalam penyebaran agama kepada pihak agama lain.

Untuk mengeliminir terjadinya konflik antar umat beragama, upaya yang harus dilakukan, antara lain: *Pertama*,

²⁵*Ibid.*

adalah peningkatan dan pendekatan yang komprehensif terhadap kepentingan semua umat beragama, baik untuk kelompok dominan maupun yang kecil sehingga semua umat beragama, baik mondial, agama timur, maupun agama lokal merasa memiliki jarak yang sama terhadap negara. *Kedua*, adalah peningkatan kualitas pendidikan agama, baik muatan, desain pola relasi antar umat, maupun integrasinya terhadap program pembangunan nasional sehingga terwujud format ideal kehidupan beragama di Indonesia. Dan *ketiga*, adalah merumuskan format kerukunan hidup umat beragama yang menjamin terwujudnya kebebasan umat beragama dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya, namun pada sisi lain kebebasan itu tidak bersinggungan dengan kebebasan yang juga dimiliki saudaranya yang lain.

Referensi

Alquran a-Karim

- Abdullah, M. Amin, *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Islam Kontemporer*, Bandung: Mizan, 2000.
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, Pent. Nanang Tahqiq, Jakarta : Paramadina, 1999.
- Elmirzanah, Syafa'atun, et. al., *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian Studi Bersama Antar Iman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Ernas, Saidin. "Dari Konflik ke Integrasi Sosial: Pelajaran Dari Ambon, Maluku." *International Journal of Islamic Thought* Vol. 14, no. 2 (t.t.): 2018.
- Effendi, Bachtiar, *Menyoal Pluralisme di Indonesia dalam Living Together in Plural Societies; Pengalaman Indonesia Inggris*, ed. Raja Juli Antoni, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- F. O'dea, Thomas, *Sosiologi Agama*, Jakarta: PT Rajawali, 1985
- M. Mahendra (Ed.), *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman; Kata Pengantar*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 1999.
- Muhammad Wahyuni Nafis, dkk. (Editor), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, Jakarta: Yayasan wakaf Paramadina, 1995.

- Piötr Sztompka, *The Sociology of Social Change*, Edisi bahasa Indonesia, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Alimandan-alih bahasa), Jakarta: Prenada, 2007
- Rahardjo, M. Dawam, "*Umat Islam dan Pembaharuan Teologi*," Bosco Carvallo dan Dasrizal (ed.), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Leppenas, 1983
- Ridwan, M. Lubis, *Agama Dalam Perbincangan Sosiologi*, Citapustaka Media Peristis, Bandung, 2010
- Smith, Donald Eugene, (ed.), *Religion, Politics, and Social Change in the Third World*, New York: Free Press, 1971. Lihat juga, *Religion and Political Modernization*, New Haven dan London: Yale University Press, 1974.
- Thantawi, Muhammad Sayyid, *Adabul Hiwar fi al-Islam*, Misr: Dar an_Nahdlah, 1997, *Etika Dialog Dalam Islam*, Penerjemah Ahmad Zamroeni Kamali, Jakarta: Penerbit Mustaqim, 2001.
- Umikalsum, Afif " *Integrasi sosial dalam membangun keharmonisan masyarakat*" Jawi, Vol.2 No. 1 2019.
- Wahid, Abdurrahman, "*Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa*," *Prisma*, edisi extra, 1984_
- , "Pribumisasi Islam," Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (ed.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: P3M, 1989
- , "Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama," *Aula*, Mei 1985
- , dkk, *Agama dan Kekerasan: dari Teologi Anarkisme Politik ke Teologi Kekerasan*, A. Helmy Faishal (ed.), Jakarta: Elsas, 1999.
- Wach, Joachim, *Sociology of Religion*, University of Chicago Press, Chicago and London, 1971.
- Waspada Online*, Monday, 05 September 2011.